

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

TA. 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya sajalah sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 terlaksana dengan baik.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun ini adalah untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun ini tidak terlepas dari kekurangan, baik dari penyajian data masih banyak yang memerlukan perbaikan. Kiranya Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi seluruh ASN Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun di masa yang akan datang.

Pamatang Raya, Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**



**JONNI SARAGIH, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196803261989031004**

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II: PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	12
B. Indikator Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	13
C. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	15
D. Pohon Kinerja Perangkat Daerah.....	17
E. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.....	19
F. Anggaran Perangkat Daerah	20
G. Rencana Aksi Perangkat Daerah.....	23
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	27
1. Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun	27
2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah	28
3. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah	42
B. Capaian Anggaran Perangkat Daerah.....	46
1. Capaian Anggaran BKPSDM Kabupaten Simalungun	46
2. Analisis dan Evaluasi Analisis Capaian Anggaran Perangkat Daerah	52
BAB IV: PENUTUP	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal.
1.1	Jumlah PNS BKPSDM Kabupaten Simalungun Berdasarkan Golongan Ruang	6
1.2	Jumlah PNS BKPSDM Kabupaten Simalungun Berdasarkan Jenjang Pendidikan .	7
1.3	Sarana dan Prasarana pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun	9
2.1	Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Simalungun (TA. 2021-2026) Beserta Indikatornya	14
2.2	Sasaran Perangkat Daerah, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun TA. 2023	14
2.3	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Simalungun	19
2.4	Rincian Anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simalungun Tahun 2023	20
2.5	Rencana Aksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simalungun Tahun 2023	23
3.1	Skala Ordinal	27
3.2	Capaian Kinerja Indikator 1	28
3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 dengan Tahun Sebelumnya	29
3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 dengan Capaian Kinerja Indikator 1 Terhadap Target Akhir Renstra (2021-2026)	29
3.5	Capaian Kinerja Indikator 2	30
3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 dengan Tahun Sebelumnya	30
3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 dengan Capaian Kinerja Indikator 2 Terhadap Target Akhir Renstra (2021-2026)	31
3.8	Capaian Kinerja Indikator 3	31
3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 dengan Tahun Sebelumnya	37
3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 dengan Capaian Kinerja Indikator 3 Terhadap Target Akhir Renstra (2021-2026)	37
3.11	Capaian Kinerja Indikator 4	38
3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 4 dengan Tahun Sebelumnya	39

No. Tabel	Judul Tabel	Hal.
3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 4 dengan Capaian Kinerja Indikator 4 Terhadap Target Akhir Renstra (2021-2026).....	39
3.14	Capaian Kinerja Indikator 5	40
3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 5 dengan Tahun Sebelumnya	41
3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 5 dengan Capaian Kinerja Indikator 5 Terhadap Target Akhir Renstra (2021-2026).....	42
3.17	Rangkuman dan Identifikasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran BKPSDM Kabupaten Simalungun pada Tahun 2023	43
3.18	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendukung Indikator Kinerja Sasaran BKPSDM Kabupaten Simalungun pada Tahun Anggaran 2023	47

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Hal.
2.1	Pohon Kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun TA. 2023.....	18
3.1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Dan Barang Milik Daerah.....	33
3.2	Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	34
3.3	Diklat Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	34
3.4	Diklat Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi	35
3.5	Pelatihan Kepemimpinan Nasional.....	35
3.6	Pelatihan Kepemimpinan Administrator.....	36
3.7	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap Lembaga/Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM TA. 2023, dimana Laporan Kinerja ini berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun TA. 2023.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun TA. 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi badan-badan, Inspektorat Kabupaten, KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan media informasi Pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun untuk mengukur tingkat keberhasilan atas Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis evaluasi dan analisis atas capaian kinerja yang diterangkan dalam LAKIP dan mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun, sebagai berikut:

1. Mewujudkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja TA. 2023;
2. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun;
3. Mensosialisasikan penyusunan program kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun dengan Rencana Strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
4. Menentukan kebijakan teknis pelaksanaan program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
5. Merumuskan kebijakan daerah dan solusi pemecahan terhadap masalah-masalah yang timbul pada bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

D. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun

Rencana Strategis Salah satu tugas pokok Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun adalah membantu Bupati Simalungun dalam menentukan kebijaksanaan di bidang aparatur pemerintahan serta penilaian atas pelaksanaannya di Kabupaten Simalungun disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan di bidang aparatur. Namun demikian secara kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan strategis kelembagaan yang mendukung pencapaian program pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam upaya mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun sebagai organisasi yang berada di dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dari segi aparatur, fasilitas kerja dan meminimalkan kelemahan dan kekurangan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan

membuat terobosan-terobosan dan perubahan ke arah perbaikan dan penyempurnaan.

Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun sebagaimana diarahkan dan menggambarkan maksud menjadi apa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun ini di masa yang akan datang.

BKPSDM Kabupaten Simalungun termasuk salah satu perangkat daerah yang termasuk dalam mendukung Misi ke 3 RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 yaitu **"Penerapan GCG (Good and Clean Government)"**. Penetapan Visi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun sangatlah penting sebagai penentu arah pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya. Visi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun adalah: **"TERWUJUDNYA PEGAWAI NEGERI YANG PROFESIONAL, BERTANGGUNG JAWAB DAN MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS SECARA BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA"**

Penjelasan dari Visi diatas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam memelihara, menyusun dan mengelola data/file untuk pemutahiran data di setiap unit kerja;
- b. Meningkatkan kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan Formal, Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Kursus-kursus;

- c. Meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan Pelayanan Prima sebagai perwujudan prinsip **Good and Clean Governance (GCG)**.

Visi tersebut pada nilai-nilai organisasi yang dianut oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun berupa meningkatkan kualitas serta kuantitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Misi merupakan sumber yang harus dilaksanakan sesuai dengan mandat yang dibagikan kepada organisasi agar tujuan organisasi tercapai dan visi yang telah ditetapkan berhasil diwujudkan. Dengan adanya Misi diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat mengenal Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun dan mengetahui peran dan program / kegiatan serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, bahwa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) Kasubbag, 3 (tiga) Jabatan Fungsional serta 18 (delapan belas) Jabatan Pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Kasubbag Umum
 - b. Kasubbag Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Pelaksana
4. Bidang Penilaian Aparatur Dan Penghargaan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

- b. Pelaksana
- 5. Bidang Mutasi & Promosi, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Pelaksana
- 6. Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Pelaksana

Jumlah PNS di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun per-31 Desember 2023 adalah sebanyak 29 orang. Tugas Utama BKPSDM Kabupaten Simalungun adalah membantu Bupati Simalungun dalam menentukan kebijaksanaan di bidang aparatur pemerintahan serta penilaian atas pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal itu, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun harus mempunyai visi sebagai cara pandang ke depan serta perwujudan dari visi tersebut dengan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah, penataan sumber daya aparatur daerah dan pengembangan sistem pengelolaan data informasi kepegawaian.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang dan jenjang pendidikan ditampilkan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2.

Tabel 1.1
Jumlah PNS BKPSDM Kabupaten Simalungun
Berdasarkan Golongan Ruang

NO	Golongan Ruang	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Pembina (IV/a)	2	0
2	Pembina Tk.I (IV/b)	1	0
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0
4	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	0
5	Pembina Utama (IV/e)	0	0
JUMLAH		4	0
6	Penata Muda (III/a)	1	0
7	Penata Muda Tk.I (III/b)	3	6

NO	Golongan Ruang	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
8	Penata (III/c)	0	2
9	Penata Tk.I (III/d)	2	4
JUMLAH		6	12
10	Pengatur Muda (II/a)	0	0
11	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	0	0
12	Pengatur (II/c)	0	1
13	Pengatur Tk.I (II/d)	5	1
JUMLAH		5	2
14	Juru Muda (I/a)	0	0
15	Juru Muda Tk.I (I/b)	0	0
16	Juru (I/c)	0	0
17	Juru Tk.I (I/d)	0	0
JUMLAH		0	0
TOTAL		15	14

Sumber: Daftar Hadir PNS BKPSDM Kabupaten Simalungun per-31 Desember 2023

Tabel 1.2
Jumlah PNS BKPSDM Kabupaten Simalungun
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Sekolah Dasar (SD)	0	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	5	2
4	Sarjana Muda (SM)/ D3	0	0
5	Sarjana (S-1)	10	11
6	Pasca Sarjana (S-2)	0	1
7	Doktor (S-3)	0	0
JUMLAH		15	14

Sumber: Daftar Hadir PNS BKPSDM Kabupaten Simalungun per-31 Desember 2023

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang digolongkan berdasarkan Strata Pendidikan dan Jabatan yaitu:

a. Menurut Strata Pendidikan:

- S2 : 1 Orang
- S1 : 21 Orang
- D.III : 0 Orang
- SMA Sederajat : 7 Orang

- Jumlah : 29 Orang**

b. Menurut Jabatan:

- Kepala Badan : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Kepala Bidang : 4 Orang
- Kasubbag : 2 Orang
- Jabatan Fungsional : 3 Orang
- Pelaksana : 18 Orang

- Jumlah : 29 Orang**

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun mencakup:

a. Bangunan Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun di Komplek Perkantoran SKPD Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya 1 (satu) Unit;

b. Kendaraan Dinas:

- Kendaraan Roda 4 : 4 (empat) Unit
- Kendaraan Roda 2 : 1 (satu) Unit

Perencanaan Strategis merupakan Keterpaduan (Unity) antara Keahlian Sumber Daya Manusia (Human Resources) dan Sumber Daya (Power Resources) di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan strategis Regional dan Nasional dan berfungsi sebagai penuntun bagi para pejabat dan pelaksana dalam pengambilan keputusan, penyusunan rencana aksi dan implementasinya.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun disusun guna mewujudkan Tujuan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun, sebagaimana dijabarkan ke dalam sasaran strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun, melalui pelaksanaan anggaran di setiap bidang yang dibuat secara bersama-sama antara pegawai dengan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana di lingkungan BKPSDM Kabupaten Simalungun.

Dalam menunjang kelancaran tugas dalam pengelolaan sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun telah didukung dengan sarana dan prasarana yang ditampilkan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simalungun

No.	Uraian	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Unit
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit
3	Kendaraan Dinas:	
-	Roda 4	4 unit
-	Roda 2	1 unit
4	PC Unit	4 unit
5	Laptop	14 unit
6	Printer	5 unit
7	Scanner	3 Unit
8	Televisi	3 unit
9	Filling Kabinet	8 unit
10	Lemari Besi	2 unit
11	Filling Besi/Metal	8 unit
12	Rak	1 unit
13	Server	1 unit

No.	Uraian	Jumlah
14	Meja Rapat	10 unit
15	Kursi Putar	20 unit
16	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 unit
17	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7 unit
18	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4 unit
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 unit
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit
22	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1 unit
23	Kamera	2 unit
24	Meja Kerja Kayu 1 Biro	5 unit
25	Meja Kerja Kayu 1/2 Biro	10 unit
26	Projector	2 unit
27	Speaker	1 unit
28	Switch Unmanaged / Pembagi	1 unit
29	Jaringan Mikrotik	1 unit
30	AC Unit	1 unit
31	Sofa	5 unit

Sumber: Buku Inventaris BKPSDM Kabupaten Simalungun Tahun 2023

E. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan informasi tentang pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun secara berkala dalam kurun waktu 1 tahun yaitu TA. 2023. Selain pengukuran kinerja, dalam laporan ini juga digambarkan tentang keberhasilan atau kegagalan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun selama tahun 2023 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan (rencana kegiatan dan anggaran) serta penetapan kinerja tahunan.

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah mengenai aspek Visi dan Misi, Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang Tujuan dan Sasaran beserta Indikator, Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran, Pohon Kinerja, Perjanjian Kinerja, Anggaran dan Rencana Aksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun TA. 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja pada setiap indikator kinerja sasaran.

B. Capaian Anggaran Perangkat Daerah

Pada sub bab ini diuraikan capaian anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun pada tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Simalungun adalah **“Meningkatkan Sumber Daya ASN yang Berkualitas dan Berkinerja Tinggi”** yang merupakan implementasi atau penjabaran dari misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026, BKPSDM Kabupaten Simalungun akan menerjemahkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Simalungun ke dalam agenda Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah khususnya dalam mengembangkan Sumber Daya Pegawai yang kompetitif pada misi mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah secara tepat.

Disamping itu, untuk menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan dan strategi BKPSDM Kabupaten Simalungun dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta mendukung arah kebijakan pembangunan nasional.

➤ Tujuan Strategis

Berdasarkan tujuan perangkat daerah, maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan data dan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi melalui penerapan program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
- c. Penempatan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui assessment centre.

2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) TA. 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian;**
- b. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD;**
- c. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur.**

➤ Sasaran Strategis

Sebagai penjabaran dari sasaran perangkat daerah, maka ditetapkan sasaran strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c. Meningkatkan kinerja ASN dan penerapan Reward and Punishment;
- d. Peningkatan disiplin aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya sebagai abdi negara dan masyarakat;
- e. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun;
- f. Terlaksananya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. Terwujudnya peningkatan Etos Kerja dan Karier Aparatur Pemerintah Daerah melalui pembinaan Karier/Promosi Jabatan;
- h. Terlaksananya penempatan sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

B. INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Melalui Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang telah dijelaskan di atas, maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun menetapkan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun Anggaran (2021-2026).

Gambaran secara menyeluruh mengenai tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Simalungun beserta indikatornya sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Simalungun
(TA. 2021-2026) beserta Indikatornya

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1.	Meningkatkan Sumber Daya ASN yang Berkualitas dan Berkinerja Tinggi	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu
			Meningkatnya kinerja dan Pelayanan OPD	Persentase penurunan pelanggaran disiplin PNS
			Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan dan Uji Kompetensi

Sumber: Renstra BKPPD Kabupaten Simalungun (TA. 2021-2026)

Selanjutnya gambaran secara menyeluruh mengenai sasaran perangkat daerah, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sasaran Perangkat Daerah, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
BKPSDM Kabupaten Simalungun TA. 2023

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	95%
2.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8,5%
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 hari
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	2,8%

Sumber: Renja & Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Simalungun TA. 2023

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang telah dijelaskan di atas, maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun menetapkan Strategi, Kebijakan dan Program Kerja yang akan ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun Anggaran (2021-2026) yakni sebagai berikut:

1. Strategi Perangkat Daerah

Strategi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun;
- b. Meningkatkan kinerja ASN dan penerapan Reward and Punishment;
- c. Peningkatan disiplin aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya sebagai abdi negara dan Masyarakat;
- d. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- e. Meningkatkan Kapasitas, Kinerja dan pelayanan OPD.

2. Kebijakan Perangkat Daerah

Melihat kondisi dan potensi yang ada pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun, serta berpedoman pada Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan ditambah tersedianya data yang akurat dan relevan, untuk 5 (lima) tahun mendatang Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun telah menetapkan kebijakan dalam pembangunan bidang kepegawaian atau aparatur pemerintah daerah.

Kebijakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dalam pembangunan SDM Aparatur Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan yang disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- b. Optimalisasi pelayanan administrasi umum;
- c. Pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta formasi jabatan;
- d. Pemantapan sistem dan manajemen kepegawaian dengan mengembangkan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);
- e. Melaksanakan penilaian Kinerja dan Penerapan Reward and Punishment;
- f. Memproses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Meningkatkan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- h. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada aparatur pemerintah daerah lainnya untuk mengikuti Pendidikan dan atau Latihan yang berkaitan dengan pengembangan karir sebagai bahan pemetaan kompetensi jabatan.

Kebijakan tersebut diatas diimplementasikan dalam bentuk Surat-Surat Keputusan Pimpinan yang berfungsi sebagai:

- Pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Mengatur mekanisme kegiatan lanjutan;
- Mengarahkan setiap pejabat dan pelaksana agar merasa memperoleh dukungan dalam bertindak dan mengimplementasikan keputusan.

3. Program Kerja Perangkat Daerah

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan sejenis dan mempunyai sasaran spesifik yang sama dan terpadu yang dilaksanakan oleh bidang-bidang guna mencapai tujuan dan sasaran. Hal-hal yang menjadi landasan penetapan Program Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun adalah:

- Memperhatikan Renstra BKPSDM Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021– 2026;
- Mempertimbangkan masa kini dan masa yang akan datang;
- Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian dalam melaksanakan program kerja.

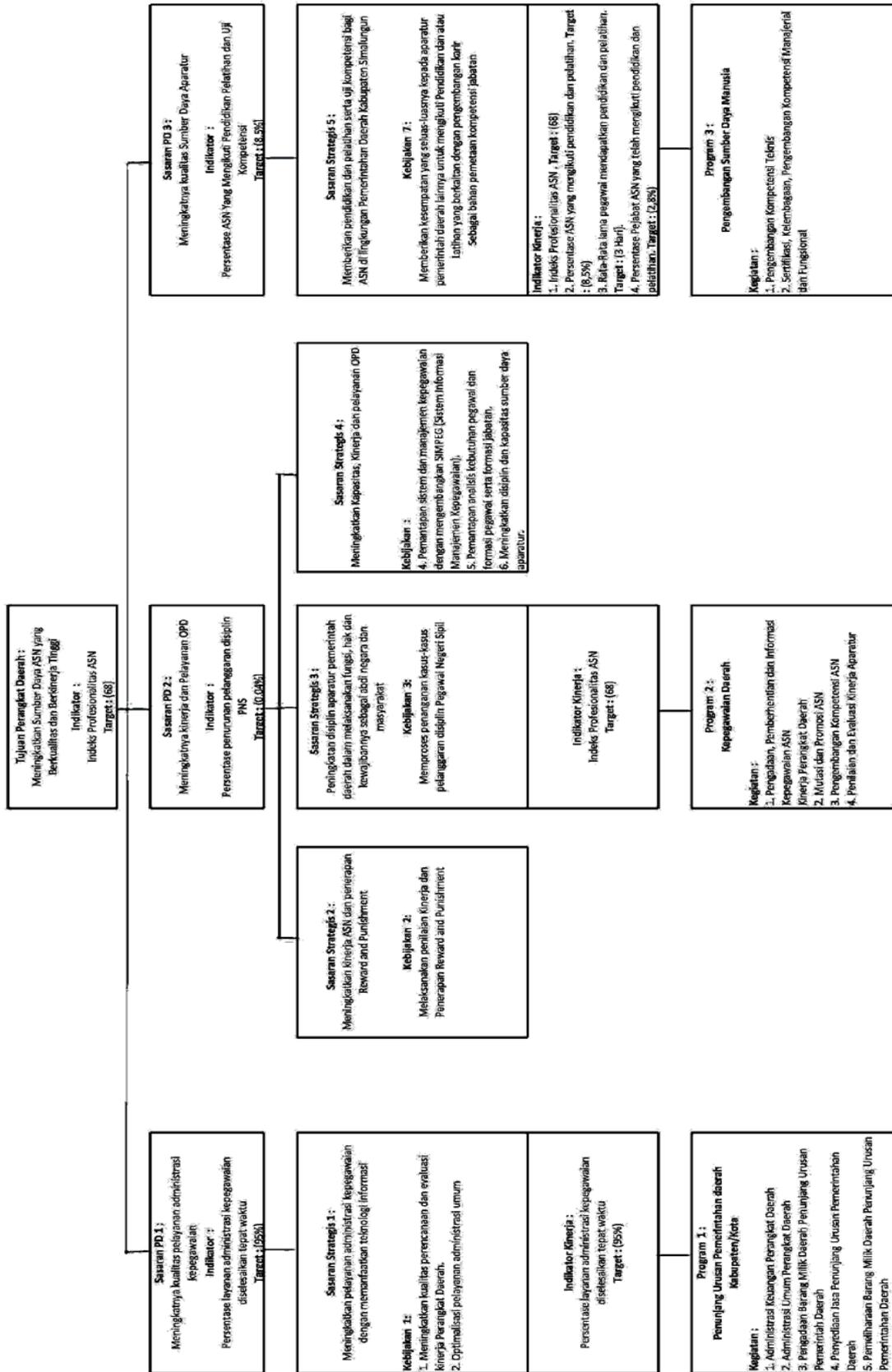
Program Kerja yang terealisasi di APBD BKPSDM TA. 2023 dimaksud adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Kepegawaian Daerah;
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

D. Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Pohon Kinerja Perangkat Daerah merupakan alat bantu bagi instansi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan instansi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Skema Pohon Kinerja adalah mencari atau menentukan akar permasalahan, yang kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh Perangkat Daerah terkait. Adapun Pohon Kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun TA. 2023 dapat dilihat pada gambar 2.1.

POHON KINERJA BKPSDM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2023



Gambar 2.1 Pohon Kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun TA. 2023

E. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Bupati Simalungun sebagai yang memberikan tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun TA. 2023 ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2023. (Perjanjian Kinerja & Perubahan Perjanjian Kinerja TA. 2023 terlampir).

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA. 2023 sebagai acuan/tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang merupakan perjanjian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 seperti yang ditampilkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja & Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Simalungun

No (1)	Sasaran Perangkat Daerah (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	95%
2.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68
3.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8,5%
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 hari
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	2,8%

No. (1)	Program (2)	Anggaran (Rp.) (3)	Keterangan (4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.411.879.841,-	P.APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	1.235.499.400,-	P.APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.479.636.100,-	P.APBD
TOTAL		5.127.015.341,-	

F. Anggaran Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun berdasarkan plafon anggaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun TA. 2023 ditampilkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Rincian Anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun TA. 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.868.469.688
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.562.750
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.506.850
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.058.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.694.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.001.900
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.252.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.048.900
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.466.133.247
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.456.589.847
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.714.300

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.829.100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.342.500
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47.342.500
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	922.997.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.943.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.168.600
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.397.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.621.600
	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	136.121.900
	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.154.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.590.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.254.000
	Pengadaan Mebel	48.254.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.439.991
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.239.991
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.200.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.740.000
	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.530.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.210.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.235.499.400
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	598.167.000
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	49.082.000
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	248.065.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	290.820.000
	Pengelolaan Data Kepegawaian	10.200.000
2	Mutasi dan Promosi ASN	383.722.000
	Pengelolaan Mutasi ASN	35.643.000
	Pengelolaan Promosi ASN	348.079.000
3	Pengembangan Kompetensi ASN	218.000.000
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	218.000.000
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.610.400
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	35.610.400
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.479.636.100
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.479.636.100
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	355.388.000
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.368.081.100
	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	756.167.000
TOTAL		8.583.605.188

Sumber: DPPA BKPSDM Kabupaten Simalungun TA. 2023

G. Rencana Aksi Perangkat Daerah

Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah dengan menyusun rencana aksi Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Aksi Kinerja Sasaran. Adapun Rencana Aksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun TA. 2023 ditampilkan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Rencana Aksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Simalungun Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja (Utama, Program, Kegiatan)	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran				Target Akhir Kinerja & Jumlah Anggaran
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	Persen	95	95	95	95	95
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	Persen	5.261.819.754	(360.979.044)	-	(32.371.022)	4.868.469.688

	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	Persen	34.235.650	-	-	(9.672.900)	24.562.750
	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	Jumlah pelayanan administrasi keuangan	Layanan	4.094.248.913	(360.979.044)	-	(267.136.622)	3.466.133.247
	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	47.342.500	-	-	-	47.342.500
	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Umum Perangkat Daerah 	Jumlah dokumen pelaksanaan Administrasi Umum perangkat daerah	Dokumen	708.158.700	-	-	214.838.500	922.997.200
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	Jumlah pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	28.254.000	-	-	20.000.000	48.254.000
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	Dokumen	172.839.991	-	-	9.600.000	182.439.991
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 	Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	176.740.000	-	-	-	176.740.000

	Daerah							
2.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	--	68	68	68	68	68
	b. Program Kepegawaian Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	962.213.400	-	-	273.286.000	1.235.499.400
	• Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan Informasi Kepegawaian	Persen	643.373.000	-	-	(45.206.000)	598.167.000
	• Mutasi dan Promosi ASN	Persentase terlaksananya kegiatan mutasi dan promosi ASN	Persen	65.230.000	-	-	318.492.000	383.722.000
	• Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	218.000.000	-	-	-	218.000.000
	• Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian kinerja dan evaluasi kinerja aparatur yang dilaksanakan	Persen	35.610.400	-	-	-	35.610.400
3.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	3	3	3	3	3
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	c. Program	Persentase ASN yang	Persen	3.337.736.104	-	-	(858.100.004)	2.479.636.100

	Pengembangan Sumber Daya Manusia	mengikuti diklat pengembangan sumber daya manusia						
	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Orang	3.337.736.104	-	-	(858.100.004)	2.479.636.100
	TOTAL ANGGARAN			9.561.769.258	(360.979.044)	-	(617.185.026)	8.583.605.188

Sumber: Laporan Pengawasan Anggaran Defenitif Per Sub Kegiatan BKPSDM per-31 Maret 2023 s/d per- 31 Desember 2023 & Renstra BKPPD Kabupaten Simalungun TA. 2021-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

1. Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun TA. 2023 disusun untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kegiatan dengan realisasinya. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun sebagai salah satu teknis pemerintahan Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsinya yang telah tertuang dalam visi dan misi berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Pengukuran Kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran yang menggunakan indikator kinerja outcome yang menggambarkan ukuran bagi pencapaian sasaran. Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 khususnya mengenai skala penilaian peringkat kinerja, gradasi nilai atau skala intensitas kinerja memiliki interval dan kriteria penilaian. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang dicapai. Penilaian akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dihasilkan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Ordinal

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat daerah

Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2023, maka perlu dilakukan analisis capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran perangkat daerah BKPSDM Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja: Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Analisis terhadap Kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun dimulai dari capaian kinerja indikator Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu selama tahun 2023, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan capaian kinerja indikator dengan tahun sebelumnya dan capaian kinerja indikator terhadap target akhir renstra yang ditampilkan pada tabel 3.2, tabel 3.3 dan tabel 3.4.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	%	95	95	100

Berdasarkan Tabel 3.2 Capaian Kinerja yang diperoleh dari indikator kinerja persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 95%, maka capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun pada indikator kinerja ini telah mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya layanan administrasi kepegawaian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	%	95	95	100	95	95	100

Berdasarkan Tabel 3.3 Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2022 menunjukkan hasil yang sama yaitu 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh layanan administrasi kepegawaian yang diterima oleh seluruh ASN selalu konsisten terselesaikan tepat waktu setiap tahunnya, karena didukung oleh penggunaan teknologi informasi di setiap bidang layanan administrasi kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 dengan Capaian Kinerja Indikator 1 terhadap Target Akhir Renstra (2021-2016)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target Akhir Renstra (2021-2026)	Capaian 2023 terhadap Target Akhir Renstra (2021-2026) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	%	95	95	100	95%	100

Berdasarkan Tabel 3.4 Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan capaian 2023 terhadap target akhir renstra TA. 2021-2026 menunjukkan hasil yang sama yaitu 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh layanan administrasi kepegawaian yang diterima oleh seluruh ASN sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Simalungun TA. 2021-2026, hal ini terjadi karena didukung oleh penggunaan teknologi informasi di setiap bidang layanan administrasi kepegawaian serta kekompakan seluruh ASN di BKPSDM Kabupaten Simalungun.

B. Indikator Kinerja: Indeks Profesionalitas ASN

Analisis terhadap Kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun dimulai dari capaian kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN selama tahun 2023, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan capaian kinerja indikator dengan tahun sebelumnya dan capaian kinerja indikator terhadap target akhir renstra yang ditampilkan pada tabel 3.5, tabel 3.6 dan tabel 3.7.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indikator 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Profesionalitas ASN	-	68	47,88	70,41

Sumber: IP ASN Wilayah Kerja Kanreg VI BKN per-23 Februari 2024

Berdasarkan tabel 3.5 Capaian Kinerja yang diperoleh dari indikator Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 adalah 70,41%. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya seluruh kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun yakni melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin yang dihitung dengan menggunakan link website <https://ip-jasn.bkn.go.id> oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Profesionalitas ASN	-	68	47,88	70,41	65	56,47	86,87

Berdasarkan tabel 3.6 Perbandingan Capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2022 menunjukkan penurunan dari 86,87% menjadi 70,41%. Hal ini disebabkan kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk tahun 2023 belum seluruhnya terpenuhi namun untuk tahun 2022 kriteria pengukuran telah terpenuhi seluruhnya.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 dengan Capaian Kinerja Indikator 2 terhadap Target Akhir Renstra (2021-2016)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target Akhir Renstra (2021-2026)	Capaian 2023 terhadap Target Akhir Renstra (2021-2026) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Profesionalitas ASN	-	68	47,88	70,41	77	62,18

Berdasarkan Tabel 3.7 Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan capaian 2023 terhadap target akhir renstra TA. 2021-2026 menunjukkan selisih hasil yang lebih tinggi yaitu sebesar 8,23%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Simalungun tahun 2023 telah memenuhi target akhir kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN yang telah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Simalungun TA. 2021-2026. Hal ini terjadi karena para ASN Kabupaten Simalungun telah memenuhi kualitas, kompetensi, kinerja dan disiplin yang lebih baik setiap tahun hingga akhir renstra nanti.

C. Indikator Kinerja: Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Analisis terhadap Kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun dimulai dari capaian kinerja indikator Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun 2023, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan capaian kinerja indikator dengan tahun sebelumnya dan capaian kinerja indikator terhadap target akhir renstra yang ditampilkan pada tabel 3.8, tabel 3.9 dan tabel 3.10.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Indikator 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	8,5	3,24	38,11

Berdasarkan Tabel 3.8 Capaian Kinerja yang diperoleh dari Indikator Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2023 adalah sebesar 38,11%. Kinerja Indikator ini terlaksana dengan baik melalui kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan Sub Kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional;
2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
3. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Adapun capaian indikator kinerja ini diperoleh dengan terlebih dahulu menghitung realisasi yaitu dengan cara membagi jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan jumlah total ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun dikali 100 persen atau $((287/8.852) \times 100\%) = 3,24\%$.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah total ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Realisasi} = \frac{287}{8.852} \times 100\% = 3,24\%$$

Kemudian realisasi dibagi dengan target indikator kinerja persentase jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dikali 100 persen atau $((3,24/8,5) \times 100\%) = 38,11\%$.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Indikator Kinerja}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{3,24}{8,5} \times 100\% = 38,11\%$$

Maka, capaian kinerja indikator Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah 38,11%.

Adapun diklat/bimtek yang telah dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Simalungun yang menggunakan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah;
- Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah;
- Diklat Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS);
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi;
- Pelatihan Kepemimpinan Nasional;
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Adapun kegiatan yang tidak terlaksana adalah Seleksi terbuka dalam pengisian JPT Pratama dan Jobfit JPT Pratama. seperti yang terlihat pada gambar-gambar berikut ini.



Gambar 3.1 Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah

SENIN, 03 JULI 2023



Gambar 3.2 Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah



Gambar 3.3 Diklat Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)



Gambar 3.4 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi



Gambar 3.5 Pelatihan Kepemimpinan Nasional



Gambar 3.6 Pelatihan Kepemimpinan Administrator



Gambar 3.7 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	8,5	3,24	38,11	5,6	2,79	49,82

Berdasarkan Tabel 3.9 Perbandingan Capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2022 menunjukkan penurunan dari 49,82% menjadi 38,11%. Hal ini disebabkan oleh jumlah kegiatan diklat/bimtek pada tahun 2022 lebih banyak dilaksanakan daripada tahun 2023 dimana kegiatan Seleksi Terbuka dalam pengisian JPT Pratama dan Jobfit JPT Pratama tidak terlaksana, selain itu jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan karena adanya penerimaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sehingga persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan juga terimbas mengalami penurunan.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 dengan Capaian Kinerja Indikator 3 terhadap Target Akhir Renstra (2021-2016)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target Akhir Renstra (2021-2026)	Capaian 2023 terhadap Target Akhir Renstra (2021-2026) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	8,5	3,24	38,11	9%	36

Berdasarkan Tabel 3.10 Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan capaian 2023 terhadap target akhir renstra TA. 2021-2026 menunjukkan selisih hasil yang lebih tinggi yaitu 2,11%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Simalungun TA. 2021-2026. Hal ini terjadi karena para ASN Kabupaten Simalungun sudah mengerti akan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN.

D. Indikator Kinerja: Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Analisis terhadap Kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun dimulai dari capaian kinerja indikator Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2023, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan capaian kinerja indikator dengan tahun sebelumnya dan capaian kinerja indikator terhadap target akhir renstra yang ditampilkan pada tabel 3.11, tabel 3.12 dan tabel 3.13.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Indikator 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	3	3	100

Berdasarkan tabel 3.11 Capaian Kinerja yang diperoleh dari indikator kinerja rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 3 hari, maka capain kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun pada indikator kinerja ini telah mencapai 100%.

Hal ini disebabkan oleh telah terlaksananya seluruh diklat/bimtek yang telah direncanakan oleh bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) seperti Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah, Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, Diklat Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS), Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi, Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 4 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	3	3	100	3	3	100

Berdasarkan Tabel 3.12 Perbandingan Capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2022 menunjukkan hasil yang sama yaitu 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan diklat/bimtek dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun selalu konsisten dalam waktu 3 hari, hal ini juga didukung dengan kekompakan tim/panitia pelaksana kegiatan diklat/bimtek yang telah dibentuk di bidang pengembangan sumber daya manusia BKPSDM Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 4 dengan Capaian Kinerja Indikator 4 terhadap Target Akhir Renstra (2021-2016)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target Akhir Renstra (2021-2026)	Capaian 2023 terhadap Target Akhir Renstra (2021-2026) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	3	3	100	3 Hari	100

Berdasarkan Tabel 3.13 Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan target akhir renstra TA. 2021-2026 menunjukkan hasil yang sama yaitu 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan diklat/bimtek dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun selalu konsisten dalam waktu 3 hari sesuai dengan target Renstra BKPSDM Kabupaten Simalungun TA. 2021-2026.

E. Indikator Kinerja: Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Analisis terhadap Kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun dimulai dari capaian kinerja indikator Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural selama tahun 2023, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan capaian kinerja indikator dengan tahun sebelumnya dan capaian kinerja indikator terhadap target akhir renstra yang ditampilkan pada tabel 3.14, tabel 3.15 dan tabel 3.16.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Indikator 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	2,8	0,19	6,78

Berdasarkan tabel 3.14 Capaian Kinerja yang diperoleh dari indikator kinerja persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural belum mencapai target yaitu sebesar 6,78%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun selama tahun 2023, ini adalah efek dari tidak terlaksananya kegiatan Seleksi terbuka dalam pengisian Jabatan JPT Pratama dan Jobfit JPT Pratama tahun 2023.

Adapun capaian indikator kinerja ini diperoleh dengan terlebih dahulu menghitung realisasi yaitu dengan cara membagi jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan jumlah total ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun dikali 100 persen atau $((17/8.852) \times 100\%) = 0,19\%$.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural}}{\text{Jumlah total ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Realisasi} = \frac{17}{8.852} \times 100\% = 0,19\%$$

Kemudian realisasi dibagi dengan target indikator kinerja persentase jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dikali 100 persen atau $((0,19/2,8) \times 100\%) = 6,78\%$.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Indikator Kinerja}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{0,19}{2,8} \times 100\% = 6,78\%$$

Kinerja Indikator ini terlaksana dengan baik melalui kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan. Adapun diklat/bimtek yang telah dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Simalungun yang menggunakan indikator kinerja ini adalah Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 5 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	2,8	0,19	6,78	3,15	2,51	79,68

Berdasarkan Tabel 3.15 Perbandingan Capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2022 menunjukkan penurunan dari 79,68% menjadi 6,78%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun selama tahun 2023 sebagai efek dari tidak terlaksananya kegiatan Seleksi terbuka dalam pengisian Jabatan JPT Pratama dan Jobfit JPT Pratama pada tahun 2023.

Selain itu jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan karena adanya penerimaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sehingga persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural juga terimbas mengalami penurunan.

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 5 dengan Capaian Kinerja Indikator 5 terhadap Target Akhir Renstra (2021-2016)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target Akhir Renstra (2021-2026)	Capaian 2023 terhadap Target Akhir Renstra (2021-2026) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	2,8	0,19	6,78	2,8	6,78

Berdasarkan Tabel 3.16 Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan target akhir renstra TA. 2021-2026 menunjukkan hasil yang sama yaitu 6,78%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan diklat/bimtek bagi Pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun telah sesuai dengan target Renstra BKPSDM Kabupaten Simalungun TA. 2021-2026.

3. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja Perangkat daerah

Hasil analisis terhadap capaian kinerja perangkat daerah yang telah diuraikan diatas selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah dengan cara merangkum dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja dan berusaha memberikan solusi yang dapat diambil untuk pemecahan masalah tersebut.

Adapun rangkuman dan identifikasi capaian kinerja indikator kinerja sasaran pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.17
Rangkuman dan Identifikasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran
BKPSDM Kabupaten Simalungun pada tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2023 terhadap Target Akhir Renstra (2021-2026)
1.	Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	95%	95%	100%	100%	100%
2.	Indeks Profesionalitas ASN	68	47,88	86,87%	70,41%	62,18%
3.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8,5%	3,24%	49,82%	38,11%	36%
4.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 Hari	3 Hari	100%	100%	100%
5.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	2,8%	0,19%	79,68%	6,78%	6,78%
Rata-Rata Capaian Kinerja				83,27%	63,06%	60,99%
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja				Tinggi	Rendah	Rendah

Berdasarkan Tabel 3.17 dengan melakukan pengukuran capaian kinerja indikator sasaran perangkat daerah melalui capaian kinerja setiap indikator selama tahun 2023 kemudian dilanjutkan dengan membandingkan capaian kinerja indikator dengan tahun sebelumnya dan capaian kinerja indikator terhadap target akhir renstra, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja mencapai target 100% selama tahun 2023 yaitu indikator kinerja Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu dan indikator kinerja Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
2. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya mengalami penurunan selama tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2022 yaitu indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dari 86,87% menjadi 70,41%, indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dari 49,82% menjadi 38,11% serta indikator kinerja Persentase pejabat ASN yang

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dari 79,68% menjadi 6,78%;

3. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya telah memenuhi target yang ditetapkan pada renstra BKPSDM Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026 yaitu indikator kinerja Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu dan indikator kinerja Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
4. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang ditetapkan pada renstra BKPSDM Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026 yaitu indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN, indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan serta indikator kinerja Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dirangkum apa saja faktor penyebab penurunan capaian indikator kinerja diatas yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 disebabkan belum terpenuhinya seluruh kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun yakni melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin yang dihitung dengan menggunakan link website <https://ip-jasn.bkn.go.id> oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan mengalami penurunan selama tahun 2023 bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 disebabkan oleh jumlah kegiatan diklat/bimtek pada tahun 2022 lebih banyak yang terlaksana dibandingkan dengan tahun 2023 dimana kegiatan Seleksi Terbuka dalam pengisian JPT Pratama dan Jobfit JPT Pratama tidak terlaksana, selain itu jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan karena adanya penerimaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sehingga persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan juga terimbas mengalami penurunan;
3. Indikator kinerja Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 disebabkan oleh menurunnya jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Simalungun selama tahun 2023 sebagai efek dari tidak terlaksananya kegiatan Seleksi terbuka dalam pengisian Jabatan JPT Pratama dan Jobfit JPT Pratama pada tahun 2023.

Berdasarkan faktor penyebab rendahnya capaian kinerja indikator diatas maka solusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Memberi arahan, bimbingan dan petunjuk kepada ASN atau Pejabat ASN yang belum melengkapi dokumen SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap tahunnya yang menjadi salah satu syarat untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
2. Melaksanakan lebih banyak kegiatan diklat/bimtek bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk tahun anggaran berikutnya karena jumlah ASN yang setiap tahun mengalami kenaikan disebabkan oleh penerimaan ASN terkhusus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) sehingga sangat perlu dilaksanakan beberapa diklat/bimtek yang bertujuan meningkatkan kompetensi / sumber daya aparatur di setiap instansi di Pemerintah Kabupaten Simalungun.
 - Solusi ini harus dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Simalungun karena BKPSDM adalah instansi yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya ASN yang Berkualitas dan Berkinerja Tinggi sesuai dengan tujuan perangkat daerah BKPSDM Kabupaten Simalungun.
3. Kegiatan Seleksi Terbuka dalam pengisian JPT Pratama dan Jobfit JPT Pratama adalah kegiatan penyeleksian para pejabat ASN terkhusus bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setingkat eselon 2 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, dimana kegiatan ini tidak terlaksana karena ada suatu perubahan peraturan.
 - Solusi yang dapat diambil adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga atau Badan yang mengawasi / memonitor segala kegiatan Seleksi Terbuka dalam pengisian JPT Pratama dan Jobfit JPT Pratama di seluruh Pemerintah di Negara Indonesia seperti KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) yang bertugas mengawasi pengembangan karir setiap pejabat ASN di seluruh Instansi Pemerintahan, sehingga kedepannya semakin meningkatlah jumlah Pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;

B. Capaian Anggaran Perangkat Daerah

1. Capaian Anggaran BKPSDM Kabupaten Simalungun

Total Penyerapan anggaran pendukung indikator kinerja sasaran BKPSDM Kabupaten Simalungun selama tahun 2023 adalah sebesar 87,25% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per-program, penyerapan anggaran terbesar terletak pada program I yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu sebesar 93,44%. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil terletak pada program II dan III yaitu program kepegawaian daerah dan program pengembangan sumber daya manusia yaitu sebesar 92,81%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran perangkat daerah dengan penyerapan anggaran perangkat selama tahun 2023, maka pencapaian sasaran indikator kinerja yang mengalami penurunan seperti indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan akan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 60% yaitu serapan anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan yakni sebesar 52,08%.

Hal ini menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran perangkat daerah belum sepenuhnya mendukung kinerja sasaran perangkat daerah itu sendiri, hal ini disebabkan oleh belum terlaksananya beberapa kegiatan yang ada pada sub kegiatan tersebut yaitu kegiatan Seleksi Terbuka dalam pengisian JPT Pratama dan Jobfit JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Anggaran dan realisasi belanja langsung selama TA. 2023 yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target Indikator Kinerja BKPSDM Kabupaten Simalungun disajikan pada tabel 3.18.

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendukung Indikator Kinerja Sasaran BKPSDM Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
I	Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.868.469.688	4.548.938.115	93,44
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.562.750	18.764.150	76,39
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.506.850	4.655.400	84,54
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.058.400	3.088.550	76,10
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.694.000	2.858.250	77,38
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.001.900	2.781.500	69,50
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.252.700	3.047.900	71,67
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.048.900	2.332.550	76,50

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.466.133.247	3.289.993.120	94,92
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.456.589.847	3.280.484.820	94,91
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.714.300	4.689.300	99,47
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.829.100	4.819.000	99,79
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.342.500	46.850.000	98,96
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47.342.500	46.850.000	98,96
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	922.997.200	828.604.602	89,77
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.943.400	7.926.000	99,78
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.168.600	65.864.000	99,54
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.397.700	11.337.000	99,47
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.621.600	53.755.000	37,43

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	136.121.900	134.282.200	98,65
		Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.154.000	9.240.000	82,84
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.590.000	546.200.402	99,93
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.254.000	47.490.000	98,42
		Pengadaan Mebel	48.254.000	47.490.000	98,42
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.439.991	159.485.651	87,42
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.239.991	46.685.651	69,43
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.200.000	112.800.000	97,92
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.740.000	157.750.592	89,25
		Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	164.530.000	145.920.592	88,69

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.210.000	11.830.000	96,89
II	Indeks Profesionalitas ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.235.499.400	1.146.634.050	92,81
		Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	598.167.000	588.970.050	98,46
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	49.082.000	48.976.000	99,78
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	248.065.000	242.492.000	97,75
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	290.820.000	287.452.050	98,84
		Pengelolaan Data Kepegawaian	10.200.000	10.050.000	98,53
		Mutasi dan Promosi ASN	383.722.000	367.934.000	95,89
		Pengelolaan Mutasi ASN	35.643.000	27.683.000	77,67
		Pengelolaan Promosi ASN	348.079.000	340.251.000	97,75
		Pengembangan Kompetensi ASN	218.000.000	166.580.000	76,41

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	218.000.000	166.580.000	76,41
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.610.400	23.150.000	65,01
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	35.610.400	23.150.000	65,01
III	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.479.636.100	1.146.634.050	92,81
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.479.636.100	1.146.634.050	92,81
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	355.388.000	350.304.000	98,57
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	1.368.081.100	712.531.000	52,08

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
		Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	756.167.000	730.873.473	96,66
		TOTAL	8.583.605.188	7.489.280.638	87,25

Sumber: Laporan Pengawasan Anggaran Defenitif Per Sub Kegiatan BKPSDM per-31 Desember 2023

2. Analisis dan Evaluasi Analisis Capaian Anggaran Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil capaian anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun selama tahun 2023 adalah sebesar 87,25% termasuk kategori sedang, hal ini disebabkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang telah direncanakan selama tahun 2023 yaitu kegiatan seleksi terbuka (selter) dan Jobfit pengisian JPT yang lowong. Solusi yang dapat diambil adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) yang bertugas mengawasi dan memonitor pengembangan karir setiap ASN terkhusus JPT Pratama di seluruh instansi pemerintah di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Berangkat dari Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, LAKIP ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi/wewenang. Seperti lazimnya penerapan bentuk sistem baru diperlukan persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena itu LAKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Akan sangat wajar apabila LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu setiap sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

Objektifitas informasi dari penerapan indikator kinerja sasaran dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun tahun 2021-2026 yang dilatarbelakangi oleh komitmen yang dibangun dari potensi yang ada. Oleh karena itu validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari sistem informasi yang ada dan konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama. Dengan penetapan indikator kinerja sasaran perangkat daerah sampai dengan output masih berorientasi pada proses, dan diharapkan untuk LAKIP berikutnya sudah dapat menunjukkan orientasi hasil melalui penyempurnaan sistem informasi.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan alasan ketidakberhasilan sasaran-sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran baru berupa kebijakan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan, berikut ini permasalahan yang dihadapi:

- a. Masih belum sesuai pengisian formasi atau pendistribusian pegawai pada masing-masing bidang kerja perangkat daerah dengan spesifikasi disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki;
- b. Masih belum validnya data base kepegawaian yang dengan mudah diakses guna mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien;
- c. Masih adanya pengisian jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun yang belum sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perangkat

daerah sehingga mempengaruhi optimalisasi Kinerja Perangkat daerah yang ada;

- d. Belum terwujud sepenuhnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, hak dan kewajibannya, terutama dalam mematuhi jam kerja;
- e. Masih belum terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan kepegawaian.

Dengan nilai-nilai yang dianut oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun berupa meningkatkan kualitas serta kuantitas diharapkan akan bisa teratasi segala kekurangan yang ada sehingga tercipta Lingkungan yang kondusif di BKPSDM Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala-kendala pelaksanaan program dan kegiatan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran, visi dan misi perangkat daerah diperlukan strategi pemecahan masalah, faktor-faktor kunci keberhasilan (FKK) berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, visi dan misi perangkat daerah secara efektif dan efisien. Untuk memperoleh Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) dan Analisis Strategi Pilihan (ASP) digunakan metode Analisa SWOT, sebagai berikut:

1. Strategi SO dengan cara menggunakan kekuatan (S) untuk memanfaatkan Peluang (O);
2. Strategi WO dengan cara mengurangi kelemahan (W) untuk memanfaatkan Peluang (O);
3. Strategi ST dengan cara menggunakan kekuatan (S) untuk mencegah ancaman (T);
4. Strategi WT dengan cara menggunakan kekuatan (W) untuk mencegah ancaman (T).

Untuk mengetahui Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) maka terlebih dahulu dilakukan analisis lingkungan perangkat daerah baik internal maupun eksternal.

Analisis Lingkungan Internal (ALI) dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap Lingkungan Intern Daerah Kabupaten Simalungun meliputi Kekuatan dan Kelemahan.

a. Kekuatan/Strength (S)

1. Adanya Stuktur Organisasi yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Peraturan Bupati Simalungun, merupakan landasan yang kuat di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
2. Adanya Prosedur Operasional (SPO) sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap tahap kegiatan;
3. Adanya Satuan Pengawas Intern yang dapat melakukan Pengawasan dan member penilaian terhadap setiap bentuk kegiatan untuk dilakukan evaluasi;
4. Adanya Kesadaran dan tanggungjawab yang tinggi setiap pegawai terhadap pekerjaan dan adanya dedikasi dan loyalitas yang tinggi setiap pegawai kepada unit kerja dan atasan.

b. Kelemahan/Weaknesses (W)

1. SPO yang belum dilaksanakan secara berkesinambungan membuat membuat tingkat pelayanan aparatur belum optimal. Rendahnya kompetensi pegawai dalam mengimplementasikan perintah dan aturan;
2. Kurangnya tindak lanjut dari hasil evaluasi kegiatan. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi (IT);
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun, hal ini dapat mempersulit pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah secara optimal.

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah dengan mencermati luar lingkungan perangkat daerah yang meliputi peluang dan tantangan.

c. Peluang/Opportunities (O)

1. Adanya kebijakan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan Aparatur;
2. Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas SDM;
3. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja, merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan aparatur yang profesional;
4. Kemajuan teknologi informasi yang dapat memudahkan mengakses informasi.

d. Ancaman/Threat (T)

1. Arus globalisasi yang membawa perubahan menuntut untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur;
2. Pasar bebas yang berpengaruh terhadap kompetensi produk dan kepercayaan kinerja aparatur;
3. Situasi politik yang dapat mempengaruhi Rekrutmen, penataan dan kinerja pegawai.

Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun adalah perwujudan kewajiban perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun pada Triwulan I dan Triwulan II TA. 2023 belum mencapai target, hal ini dapat dilihat dari persentase capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran.

Demikian LAKIP ini diperbuat dan selanjutnya agar hasil yang telah dicapai dapat ditingkatkan dengan dukungan dari seluruh aspek yang ada dan atas perhatian semua pihak diucapkan terimakasih.

Pamatang Raya, Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**



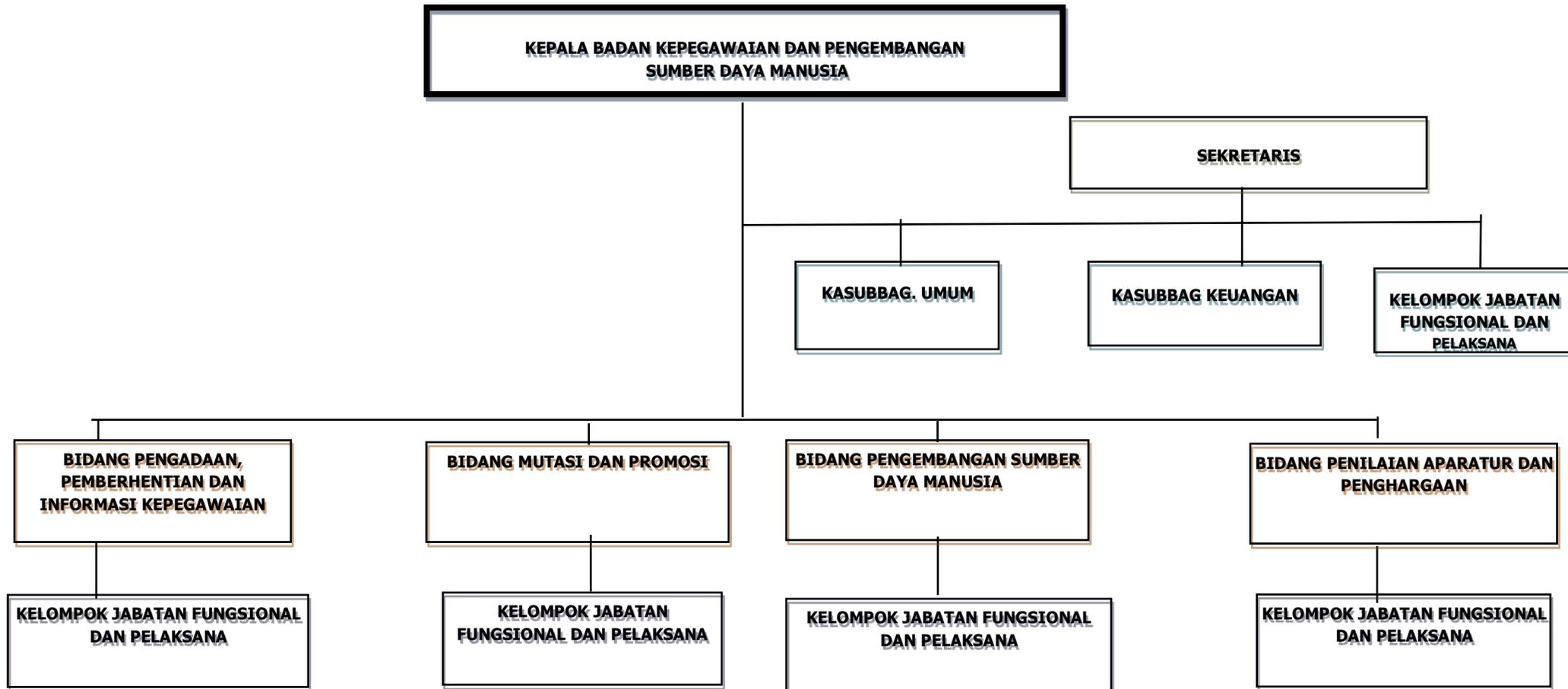
**JONNI SARAGIH, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196803261989031004**

LAMPIRAN:

1. Struktur Organisasi.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jonni Saragih, S.IP.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H
Jabatan : Bupati Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, Februari 2023

Pihak Kedua

Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H

Pihak Pertama

Jonni Saragih, S.IP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

No. (1)	Sasaran Perangkat Daerah (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	95%
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	3 hari 8,5% 2,8 %

No (1)	Program (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.177.114.241	APBD
2	Program Kepegawaian Daerah	962.213.400	APBD
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.337.736.104	APBD
TOTAL		5.477.063.745	

Pamatang Raya, Februari 2023

Pihak Kedua

Bupati Simalungun,



Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H

Pihak Pertama

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun,



Jonni Saragih, S.IP.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Serubabel Saragih, SKM
Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Jonni Saragih, S.IP
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai ampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Jonni Saragih, S.IP
NIP. 196803261989031004

Pamatang Raya, Februari 2023
Pihak Pertama


Serubabel Saragih, SKM
NIP. 196609071990031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN

NO (1)	Sasaran Perangkat Daerah (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	95 %

No (1)	Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.235.650	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.543.400	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.342.500	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	708.158.700	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	28.254.000	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.839.991	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.740.000	APBD
TOTAL		1.177.114.241	

Pamatang Raya, Februari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jonni Saraeth, S.IP.
NIP. 196803261989031004

Seruhabel Sarasih, SKM.
NIP. 196609071990031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinton Parulian Damanik, SE
Jabatan : Ka. Bid. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Jonni Saragih, S.IP.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai ampunan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jonni Saragih, S.IP.

NIP. 196803261989031004

Pamatang Raya, Februari 2023
Pihak Pertama

Rinton Parulian Damanik, SE

NIP. 198905262015051001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	8,5% 3 hari 2,8 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan Kompetensi ASN	218.000.000	APBD
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Managerial dan Fungsional	2.636.812.104	APBD
TOTAL		2.854.812.104	

Pamatang Raya, Februari 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Simalungun,

Pihak Pertama
Ka. Bid. Pengembangan Sumber Daya Manusia


Jonni Saragih, S.IP.
NIP. 196803261989031004


Rinton Parulian Damanik, SE
NIP. 198905262015051001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bertian Evi Yenni Pakpahan, SH
Jabatan : Ka. Bid. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Jonni Saragih, S.IP.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jonni Saragih, S.IP.
NIP. 196803261989031004

Pamatang Raya, Mei 2023
Pihak Pertama

Bertian Evi Yenni Pakpahan, SH
NIP. 198604142015052002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO (1)	Sasaran Perangat Daerah (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	8,5% 3 hari 2,8 %

No (1)	Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1	Pengembangan Kompetensi ASN	218.000.000	APBD
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Managerial dan Fungsional	2.636.812.104	APBD
TOTAL		2.854.812.104	

Pamatang Raya, Mei 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun,



Jonni Saragih, S.IP.
NIP. 196803261989031004

Pihak Pertama
Ka.Bid. Pengembangan Sumber Daya Manusia



Berlian Evi Yenni Pakpahan, SH
NIP. 198604142015052002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulaika Gultom, SH., M.Si

Jabatan : Ka. Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Jonni Saragih, S.IP.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Pamatang Raya, Februari 2023
Pihak Pertama

Jonni Saragih, S.IP.
NIP. 196803261989031004

Sulaika Gultom, SH., M.Si
NIP. 197604292009012001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO (1)	Sasaran Perangkat Daerah (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68

No (1)	Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.610.400	APBD
2	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	290.820.000	APBD
TOTAL		326.430.400	

Pamatang Raya, Februari 2023

Pihak Kedua

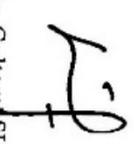
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun,

Pihak Pertama

Ka. Bid. Penilaian Aparatur dan Penghargaan

Jonni Saraaih, S.P.
NIP. 196803261989031004

Sulaka Gutom SH., M. Si
NIP. 197604292009012001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sardi Barita Sinaga, SH
Jabatan : Ka. Bid. Mutasi dan Promosi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Jonni Saragih, S.IP.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai ampunan Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Pamatang Raya, Februari 2023

Jonni Saragih, S.IP.
NIP. 196803261989031004

Sardi Barita Sinaga, SH
NIP. 196912171994021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO (1)	Sasaran Perangkat Daerah (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68
2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	8,5% 3 hari 2,8 %

No (1)	Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1	Mutasi dan Promosi ASN	65.230.000	APBD
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	700.924.000	APBD
TOTAL		766.154.000	

Pamatang Raya, Februari 2023

Pihak Kedua
KepalaBadanKepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia
KabupatenSimalungun,

Pihak Pertama
Ka. Bid.Mutasi dan Promosi


Jonni Saragih, S.I.P.
NIP. 196803261989031004


Sardi Barita Simaga, SH
NIP. 196912171994021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pulung Kita Sinaga, SH
Jabatan : Ka. Bid. Pengadaan, Pembertentian, dan Informasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Jonni Saragih, S.IP.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jonni Saragih, S.IP
NIP. 196803261989031004

Pihak Pertama

Pulung Kita Sinaga, SH
NIP. 196908121993031005

Pamatang Raya, Februari 2023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO (1)	Sasaran Perangkat Daerah (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68

No (1)	Kegiatan (2)	Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	352.553.000	APBD
TOTAL		352.553.000	

Pamatang Raya, Februari 2023

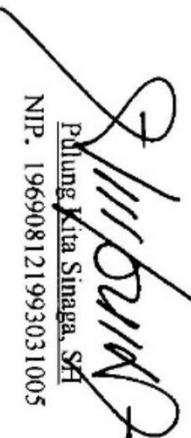
Pihak Kedua

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Simalungun


Keni Saragih, S.IP
NIP. 196803261989031004

Pihak Pertama

Ka. Bid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian


Polung Kita Sinaga, SH
NIP. 196908121993031005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jonni Saragih, S.IP.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H

Jabatan : Bupati Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H

Jonni Saragih, S.IP.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN

No. (1)	Sasaran Perangkat Daerah (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian diselesaikan tepat waktu	95%
2.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68
3.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	8,5% 3 hari 2,8 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.411.879.841	P.APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	1.235.499.400	P.APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.479.636.100	P.APBD
TOTAL		5.127.015.341	

Pamatang Raya, November 2023

Bupati Simalungun,

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Simalungun,

Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H

Jonni Saragih, S.IP.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Serubabel Saragih, SKM

Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jonni Saragih, S.IP

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jonni Saragih, S.IP.

NIP. 196803261989031004

Pamintang Raya, November 2023
Pihak Pertama,

Serubabel Saragih, SKM

NIP. 196609071990031007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	95 %

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.562.750
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.342.500
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	922.997.200
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	48.254.000
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.439.991
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.740.000
TOTAL		1.402.336.441

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun

Leni Saragih, S.IP.

NIP. 196803261989031004

Pamatang Raya, November 2023
 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Serubabet Saragih, SKM.

NIP. 196609071990031007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Arbo, SE

Jabatan : Kasubag Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Serubabel Saragih, SKM

Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Serubabel Saragih, SKM,

Dicky Arbo, SE

NIP. 196609071990031007

NIP. 19780726 2003121005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN

No. (1)	Sasaran Perangkat Daerah (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.	95 %

Sekretaris Badan

Serubabel Saragih, SKM
NIP. 156609071990031007

Pamatang Raya, November 2023

Kasubag Umum


Dicky Aribowo SE
NIP. 197807262003121005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daryanti Saragih, SE

Jabatan : Kasubbag Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Serubabel Saragih, SKM

Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, November 2023.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Serubabel Saragih, SKM.
NIP. 196609071990031007

Daryanti Saragih, SE
NIP. 197206302007012002

**PERUBAHAN PERANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

No. (1)	Sasaran Perangkat Daerah (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu.	95 %

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.543.400
TOTAL		9.543.400

Sekretaris Badan

Pamatang Raya, November 2023.
Kasubbag Keuangan


Serubet Saragih, SKM
NIP. 196609071990031007


Daryanti Saragih, SE
NIP. 197206302007012002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berlian Evi Yenni Pakpahan, SH

Jabatan : Ka. Bid. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jonni Saragih, S.I.P.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, November 2023

Pihak Pertama,

Jonni Saragih, S.I.P.
NIP. 196803261989031004

Berlian Evi Yenni Pakpahan, SH
NIP. 198604142015052002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68
2.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	8,5% 3 hari 2,8 %

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengembangan Kompetensi ASN	218.000.000
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Managerial dan Fungsional	1.855.652.100
TOTAL		2.073.652.100

Pamatang Raya, November 2023

Ka.Bid. Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Berlian Evi Yenni Pakpahan, SH
NIP. 198604142015052002

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Simalungun,



Jonni Saragih, S.I.P.
NIP. 196803261989031004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulaika Gultom, SH, M.Si

Jabatan : Ka. Bidang Penilaian Aparatur dan Penghargaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jonni Saragih, S.IP.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, November 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Jonni Saragih, S.IP.
NIP. 196803261989031004

Sulaika Gultom, SH, M.Si
NIP. 197604292009012001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN

NO	Sasaran Peringkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.610.400
2.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	290.820.000
	TOTAL	326.430.400

Pamatang Raya, November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Simalungun,



Jonni Saragih, S.IP.
NIP. 196803261989031004

Ka. Bid. Penilaian Aparatur
dan Penghargaan



Sulaika Gulkon, SH, M.Si
NIP. 197604292009012001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sardi Barita Sinaga, SH
Jabatan : Ka. Bid. Mutasi dan Promosi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jonni Saragih, S.IP.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya, November 2023

Pihak Kedua,

Jonni Saragih, S.IP.
NIP. 196803261989031004

Pihak Pertama,

Sardi Barita Sinaga, SH
NIP. 196912171994021001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN

No.	Sasaran Perangkat Daerah (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1.	Meningkatnya kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68
2.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	8.5% 3 hari 2,8 %

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Mutasi dan Promosi ASN	383.722.000
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	623.984.000
TOTAL		1.007.706.000

Pamatang Raya, November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Simalungun,

Jonni Saraasih, S.I.P.
NIP. 196803261989031004

Ka. Bid.Mutasi dan Promosi

Sardi Barita Sinaga, SH
NIP. 196912171994021001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pulung Kita Sinaga, SH
Jabatan : Ka. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jonni Saragih, S.IP.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Simalungun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jonni Saragih, S.IP.
NIP. 196803261989031004

Pamatang Raya, November 2023
Pihak Pertama,

Pulung Kita Sinaga, SH
NIP. 196908121993031005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Profesionalitas ASN	68

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	307.347.000
TOTAL		307.347.000

Pamatang Raya, November 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Kabupaten Simalungun

Jonni Saragih, S.IP.
NIP. 196803261989031004

Ka.Bid. Pengadaan, Pemberhentian
dan Informasi Kepegawaian

Pulung Kia Sinaea, SH
NIP. 196908121993031005